



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

BAB II
STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (4) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (5) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Kedua
Kode Rekening APBD
Pasal 4

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 5

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Pasal 6

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kode akun Keuangan Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja, dan kode rekening pembiayaan merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
- (6) Kode Akun Neraca merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini.
- (7) Untuk keselarasan dan penyesuaian urusan dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk penyempurnaan lebih lanjut menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah, penambahan kode rekening APBD agar dikonsultasikan lebih lanjut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Siak.

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam menyusun RKA-SKPD masing-masing agar mempedomani dan menyesuaikan dengan kode rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 89

KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
101	Pendidikan	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
102	Kesehatan	1.02.01	Dinas Kesehatan
		1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.01	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
106	Sosial	1.06.01	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
201	Tenaga Kerja	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Pangan	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan
204	Pertanahan	2.04.01	Urusan Pertanahan (Sekretariat Daerah)
205	Lingkungan Hidup	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.01	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
209	Perhubungan	2.09.01	Dinas Perhubungan
210	Komunikasi dan Informatika	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
212	Penanaman Modal	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
213	Kepemudaan dan Olah Raga	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
214	Statistik	2.14.01	Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika)
215	Persandian	2.15.01	Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)
216	Kebudayaan	2.16.01	Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
217	Perpustakaan	2.17.01	Dinas Perpustakaan
218	Kearsipan	2.18.01	Urusan Kearsipan (Dinas Perpustakaan)
3	URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN	3	URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN
301	Kelautan dan Perikanan	3.01.01	Dinas Perikanan dan Peternakan
302	Pariwisata	3.02.01	Dinas Pariwisata
303	Pertanian	3.03.01	Dinas Pertanian
		3.03.02	Urusan Pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)
304	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.04.01	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
305	Perdagangan	3.05.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
306	Perindustrian	3.06.01	Urusan Perindustrian (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)
307	Transmigrasi	3.07.01	Urusan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
401	Perencanaan	4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
402	Kuangan	4.02.01	Badan Keuangan Daerah
403	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
404	Penelitian dan Pengembangan	4.04.01	Urusan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
406	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.06.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5	FUNGSI PENDUKUNG	5	FUNGSI PENDUKUNG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI
1	2	3	4
501	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	5.01.01	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
502	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.02.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
503	Sekretariat Daerah	5.03.01	Sekretariat Daerah
504	Sekretariat DPRD	5.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
505	Inspektorat	5.05.01	Inspektorat
506	Sekretariat KORPRI	5.06.01	Sekretariat KORPRI
507	Kecamatan	5.07.01	Kecamatan Siak
		5.07.02	Kecamatan Sungai Apit
		5.07.03	Kecamatan Minas
		5.07.04	Kecamatan Tualang
		5.07.05	Kecamatan Dayun
		5.07.06	Kecamatan Kerinci Kanan
		5.07.07	Kecamatan Bunga Raya
		5.07.08	Kecamatan Sungai Mandau
		5.07.09	Kecamatan Kandis
		5.07.10	Kecamatan Koto Gasib
		5.07.11	Kecamatan Lubuk Dalam
		5.07.12	Kecamatan Sabak Auh
		5.07.13	Kecamatan Mempura
		5.07.14	Kecamatan Pusako

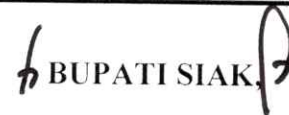
6 BUPATI SIAK, 

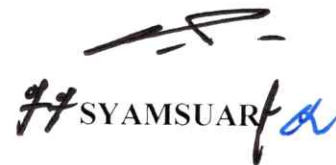
77 SYAMSUAR 

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 89 Tahun 2016
Tanggal : 6 Desember 2016

SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN
1	2
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan

 BUPATI SIAK

 SYAMSUAR

KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	
1	2
01	Pelayanan Umum
02	Pertanahan *)
03	Ketertiban dan Ketentraman
04	Ekonomi
05	Lingkungan Hidup
06	Perumahan dan Fasilitas Umum
07	Kesehatan
08	Pariwisata dan Budaya
09	Agama *)
10	Pendidikan
11	Perlindungan Sosial

Keterangan :
*) Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah

BUPATI SIAK,
SYAMSUAD

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
X XX	XX	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
X XX	XX	01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
X XX	XX	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
X XX	XX	01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
X XX	XX	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
X XX	XX	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
X XX	XX	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X XX	XX	01.10	Penyediaan alat tulis kantor
X XX	XX	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X XX	XX	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X XX	XX	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
X XX	XX	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
X XX	XX	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor
X XX	XX	01.17	Penyediaan makanan dan minuman
X XX	XX	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X XX	XX	01.19	Penyediaan jasa keamanan kantor
X XX	XX	01.20	Penyediaan jasa administrasi kantor
X XX	XX	01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
X XX	XX	01.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.24	Penyediaan jasa administrasi kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.25	Penataan dan Pengelolaan Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah
X XX	XX	01.26	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Labkesda Kabupaten Siak
X XX	XX	01.27	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Siak
X XX	XX	01.28	Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Pemerintah Wajib Lapor
X XX	XX	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
X XX	XX	02.01	Pembangunan rumah jabatan
X XX	XX	02.02	Pembangunan rumah dinas
X XX	XX	02.03	Pembangunan gedung kantor
X XX	XX	02.04	Pengadaan mobil jabatan
X XX	XX	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.10	Pengadaan mebeleur
X XX	XX	02.11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya
X XX	XX	02.12	Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
X XX	XX	02.13	Pengadaan peralatan pembangkit listrik dan kelengkapannya
X XX	XX	02.14	Pengadaan instalasi udara
X XX	XX	02.15	Pengadaan Sarana Publikasi
X XX	XX	02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan
X XX	XX	02.17	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur
X XX	XX	02.18	Pengadaan peralatan Satuan Pemadam Kebakaran
X XX	XX	02.19	Pengadaan Peralatan Satuan Pengamanan
X XX	XX	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
X XX	XX	02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
X XX	XX	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X XX	XX	02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
X XX	XX	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
X XX	XX	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX	XX	02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
X XX	XX	02.32	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
X XX	XX	02.33	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor
X XX	XX	02.34	Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
X XX	XX	02.35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
X XX	XX	02.36	Pemeliharaan rutin/berkala sound system
X XX	XX	02.37	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum
X XX	XX	02.38	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
X XX	XX	02.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
X XX	XX	02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
X XX	XX	02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
X XX	XX	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
X XX	XX	02.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
X XX	XX	02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.45	Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa
X XX	XX	02.46	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor
X XX	XX	02.47	Penyusunan DED
X XX	XX	02.48	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Gedung Peninggalan Bersejarah
X XX	XX	02.49	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak
X XX	XX	02.50	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah
X XX	XX	02.51	Pembangunan Gedung / Gudang Barang
X XX	XX	02.52	Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Pemerintah Kabupaten Siak
X XX	XX	02.53	Fasilitasi Penyusunan LPPD Kab.Siak
X XX	XX	02.54	Pengadaan kendaraan Khusus / Lainnya
X XX	XX	02.55	Pembuatan Pagar Workshop
X XX	XX	02.56	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-KTP
X XX	XX	02.57	DED (Detail Engineering Design) Gedung Kantor Desa
X XX	XX	02.58	Penyusunan DED Rumah Dinas Jabatan Camat Siak
X XX	XX	02.59	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN)
X XX	XX	02.60	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Siak
X XX	XX	02.61	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sekolah Keagamaan
X XX	XX	02.62	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan
X XX	XX	02.63	Penyusunan DED Fasilitas Perkantoran
X XX	XX	02.64	Perencanaan Teknis Semenisasi Kab. Siak
X XX	XX	02.65	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Lanscape
X XX	XX	02.66	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak
X XX	XX	02.67	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak
X XX	XX	02.68	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan
X XX	XX	02.69	Pembangunan Sekolah Keagamaan
X XX	XX	02.70	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan
X XX	XX	02.71	Pembangunan Pasar Seni
X XX	XX	02.72	DED (Detail Engenering Design) Pembangunan Gedung/Ruang
X XX	XX	02.73	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
X XX	XX	02.74	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan
X XX	XX	02.75	Pembangunan Gedung Serba Guna di Wilayah Kecamatan
X XX	XX	02.76	Pembangunan Gedung Kantor Koramil
X XX	XX	02.77	Pembangunan Rumah Dinas di Wilayah Kecamatan
X XX	XX	02.78	Rehab Gedung Kantor KUA
X XX	XX	02.79	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Minas
X XX	XX	02.80	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Dayun
X XX	XX	02.81	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kandis
X XX	XX	02.82	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pusako
X XX	XX	02.83	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Siak
X XX	XX	02.84	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Tualang
X XX	XX	02.86	Pembangunan Gedung Diklat BKD
X XX	XX	02.87	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
X XX	XX	02.88	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah
X XX	XX	02.89	Pembangunan Lanscape dan Pagar Instalasi Farmasi Kabupaten
X XX	XX	02.90	Pekerjaan Interior Kantor
X XX	XX	02.91	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Publikasi
X XX	XX	02.92	Pembangunan Gedung Kwartab Pramuka
X XX	XX	02.93	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak
X XX	XX	02.94	Land Clearing Lahan Pemerintah Kab. Siak
X XX	XX	02.95	Pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah
X XX	XX	02.96	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar istana siak
X XX	XX	02.97	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar masjid bersejarah
X XX	XX	02.98	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak
X XX	XX	02.99	Timbunan di Wilayah Kecamatan
X XX	XX	02.100	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Mapolres Kab. Siak
X XX	XX	02.101	Pembangunan Kantor Lurah
X XX	XX	02.102	Penyusunan Dokumen AMDAL Makodim Kabupaten Siak
X XX	XX	02.103	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak
X XX	XX	02.104	Pembangunan Gedung Arsip

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX	XX	02.105	Landscape Balairung (Pendopo) Perumahan Jabatan
X XX	XX	02.106	Pembangunan Air Mancur Kawasan Lapangan Maharatu Center
X XX	XX	02.107	Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape) Pengembangan Eks. Gedung Balai Tenun
X XX	XX	02.108	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan
X XX	XX	02.109	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas Jabatan Bupati Siak
X XX	XX	02.110	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PLTD pemda Kab.Siak
X XX	XX	02.111	Pemeliharaan/relokasi dan optimalisasi jaringan listrik dan kelengkapannya di Kab. Siak
X XX	XX	02.112	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Siak Televisi (Siak TV)
X XX	XX	02.113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak
X XX	XX	02.114	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi TV Relay Swasta Nasional Siak
X XX	XX	02.115	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Siak TV
X XX	XX	02.116	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
X XX	XX	02.117	Penyusunan UKL/UPL
X XX	XX	02.118	Pembangunan Lapangan Upacara Kantor Camat Sungai Apit
X XX	XX	02.119	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Tualang
X XX	XX	02.120	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kerinci Kanan
X XX	XX	02.121	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Siak
X XX	XX	03	Program peningkatan disiplin aparatur
X XX	XX	03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi
X XX	XX	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
X XX	XX	03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
X XX	XX	03.04	Pengadaan pakaian KORPRI
X XX	XX	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X XX	XX	03.06	Pengadaan Pakaian Kedaerahan
X XX	XX	03.07	Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani pegawai
X XX	XX	03.08	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Jabatan
X XX	XX	03.09	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya
X XX	XX	03.10	Penyelenggaraan SKJ Pegawai di Lingkungan Kab. Siak
X XX	XX	03.11	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar
X XX	XX	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X XX	XX	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal
X XX	XX	05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
X XX	XX	05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
X XX	XX	05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur
X XX	XX	05.05	Kegiatan penelitian mandiri (Fungsional)
X XX	XX	05.06	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD
X XX	XX	05.07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
X XX	XX	05.08	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
X XX	XX	05.09	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
X XX	XX	05.10	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan
X XX	XX	05.11	Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Kecamatan Se-Kab. Siak
X XX	XX	05.12	Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan
X XX	XX	05.13	Pembelajaran langsung pelayanan perizinan Kota Yogyakarta
X XX	XX	05.14	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas
X XX	XX	05.15	Konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan dibidang pendidikan
X XX	XX	05.16	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
X XX	XX	05.17	Bimbingan teknis dan diklat teknis kearsipan
X XX	XX	05.18	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah kabupaten siak
X XX	XX	05.19	Bimbingan teknis dan diklat teknis perpustakaan
X XX	XX	05.20	Pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan
X XX	XX	05.21	Bimbingan teknis pembekalan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia (HAM) Kabupaten Siak
X XX	XX	05.22	Bimbingan teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN)
X XX	XX	05.23	Bimbingan teknis penyusunan dan perancangan MoU dan surat perjanjian
X XX	XX	05.24	Bimbingan teknis penegakan Peraturan Daerah bagi Satpol PP Kabupaten Siak
X XX	XX	05.25	Bimbingan teknis penegakan peraturan perundang-undangan bagi PPNS Kabupaten Siak
X XX	XX	05.26	Bimbingan teknis sistem informasi hukum (Siskum) peraturan perundang - undangan
X XX	XX	05.27	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
X XX	XX	05.28	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa
X XX	XX	05.29	Bimbingan teknis pelayanan publik
X XX	XX	05.30	Penyusunan analisa beban kerja
X XX	XX	05.31	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah
X XX	XX	05.32	Sosialisasi standar pelayanan minimal
X XX	XX	05.33	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi SKPD
X XX	XX	05.34	Pelatihan dan Pendidikan Data Base dan Implementasi Paten bagi Aparatur Kecamatan
X XX	XX	05.35	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan.
X XX	XX	05.36	Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008
X XX	XX	05.37	Pelatihan/Training Pembentukan Karakter dan Budaya Kerja
X XX	XX	05.38	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
X XX	XX	05.39	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)
X XX	XX	05.40	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM III)

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX	XX	05.41	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
X XX	XX	05.42	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik dalam bidang kependudukan
X XX	XX	05.43	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tentang Pelayanan dan Pencatatan Sipil
X XX	XX	05.44	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik tentang Peristiwa Kelahiran dan Pencatatan Sipil
X XX	XX	05.45	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kapasitas Perangkat Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi
X XX	XX	05.46	Sosialisasi revisi PP 41 tahun 2007 bagi perangkat daerah
X XX	XX	05.47	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
X XX	XX	05.48	Bimbingan teknis penilaian kinerja individu pegawai
X XX	XX	05.49	Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan Prima
X XX	XX	05.50	Hari Ulang Tahun (HUT Satpol dan Linmas)
X XX	XX	05.51	Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
X XX	XX	05.52	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
X XX	XX	05.53	Bimbingan Teknis Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
X XX	XX	05.54	Bimbingan Teknis Aparatur Pertanian
X XX	XX	05.55	Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian
X XX	XX	05.56	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Pertanian
X XX	XX	05.57	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian
X XX	XX	05.58	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
X XX	XX	05.59	Pelatihan tentang Pengendalian Penyakit
X XX	XX	05.60	Pelatihan Petugas Promosi dan Kesehatan Keluarga
X XX	XX	05.61	Pelatihan Petugas Pelayanan Kesehatan
X XX	XX	05.62	Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
X XX	XX	05.63	Reward Petugas Pelayanan
X XX	XX	05.64	Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik
X XX	XX	05.65	Pelatihan dan pendidikan aparatur kecamatan
X XX	XX	05.66	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik
X XX	XX	05.67	Sosialisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
X XX	XX	05.68	Sosialisasi Undang-undang ASN
X XX	XX	05.69	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)
X XX	XX	05.70	Bimbingan Teknis Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
X XX	XX	05.71	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan untuk Tingkat Dasar
X XX	XX	05.72	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa
X XX	XX	05.73	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan
X XX	XX	05.74	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)
X XX	XX	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
X XX	XX	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
X XX	XX	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
X XX	XX	06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
X XX	XX	06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
X XX	XX	06.05	Penyusunan Laporan LAKIP
X XX	XX	06.06	Penyusunan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi
X XX	XX	06.07	Penyusunan Renstra
X XX	XX	06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
X XX	XX	06.09	Monitoring dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
X XX	XX	06.10	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah
X XX	XX	06.11	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak
X XX	XX	06.12	Penyusunan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
X XX	XX	06.13	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
101			Pendidikan
101	XX	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.01	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
101	XX	15.02	Pembangunan Gedung Sekolah
101	XX	16	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	16.01	Pengembangan pendidikan anak usia dini
101	XX	16.02	Pembinaan Paud Terpadu Pembina Holistik integratif
101	XX	17	Program Pendidikan Masyarakat
101	XX	17.01	Penyelenggaraan Paket A setara SD
101	XX	17.02	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
101	XX	17.03	Penyelenggaraan Paket C setara SMA
101	XX	18	Program Pendidikan Dasar
101	XX	18.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Dasar
101	XX	18.02	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Menengah Pertama
101	XX	18.03	Pengadaan mebeulair Sekolah Dasar (SD Sederajat)
101	XX	18.04	Pengadaan mebeulair Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
101	XX	18.05	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)
101	XX	18.06	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)
101	XX	18.07	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD sederajat)
101	XX	18.08	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)
101	XX	19	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar
101	XX	19.01	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI
101	XX	19.02	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs
101	XX	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
101	XX	20.01	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Guru SD/MI
101	XX	20.02	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs
101	XX	20.03	Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan tingkat dasar (biaya pendidik kelas)
101	XX	20.04	Diklat Calon Pengawas (Cawas)
101	XX	20.05	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru
101	XX	20.06	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik pendidikan inklusif
101	XX	20.07	Dukungan kesejahteraan Tenaga Kependidikan
101	XX	20.08	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
101	XX	20.09	Penilaian Angka Kredit Guru
101	XX	21	Program Manajemen Layanan Pendidikan
101	XX	21.01	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
101	XX	21.02	Updating Profil Pendidikan dan Kebudayaan
101	XX	21.03	Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Siak
101	XX	23	Program Pendidikan Karakter
101	XX	23.01	Pembinaan pendidikan karakter
102			Kesehatan
102	XX	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
102	XX	15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
102	XX	15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
102	XX	15.03	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
102	XX	16	Program Pembinaan upaya kesehatan
102	XX	16.01	Peningkatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat
102	XX	16.02	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
102	XX	16.03	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes
102	XX	16.04	Peningkatan pelayanan kesehatan Rerual Sistem
102	XX	16.05	Pelayanan kesehatan pada event-event resmi dan hari-hari besar
102	XX	16.06	Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas
102	XX	16.07	Pelayanan dan pembinaan Fit for School
102	XX	16.08	Pembinaan pelayanan kesehatan Batra
102	XX	16.09	Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan
102	XX	16.10	Pembinaan upaya kesehatan kerja
102	XX	16.11	Pembinaan Pelayanan kesehatan usia lanjut
102	XX	16.12	Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa
102	XX	16.13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Siak
102	XX	16.14	Pendampingan dan penilaian akreditasi Puskesmas
102	XX	16.15	Akreditasi Rumah Sakit
102	XX	17	Program Pengawasan obat dan makanan
102	XX	17.01	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
102	XX	18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
102	XX	18.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
102	XX	18.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
102	XX	19	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
102	XX	19.01	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
102	XX	19.02	Penanggulangan kurang energi protein (KEP); enemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat besi lainnya
102	XX	19.03	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
102	XX	19.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, dan Reproduksi
102	XX	19.05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
102	XX	19.06	Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah
102	XX	19.07	Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Siak
102	XX	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
102	XX	20.01	Penyehatan lingkungan
102	XX	20.02	Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat
102	XX	20.03	Pengawasan dan pengendalian sarana air minum
102	XX	20.04	Pengawasan dan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU)

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
102	XX	20.05	Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman
102	XX	21	Program Pengendalian Penyakit
102	XX	21.01	Peningkatan Imunisasi
102	XX	21.02	Pengendalian Penyakit Menular Langsung
102	XX	21.03	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
102	XX	21.04	Pengendalian Penyakit Tidak Menular
102	XX	21.05	Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji
102	XX	21.06	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
102	XX	21.07	Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS
102	XX	21.08	Pemberantasan penyakit Tuberkulosis (TB)
102	XX	22	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
102	XX	22.01	Pembangunan Puskesmas
102	XX	22.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
102	XX	22.03	Rehabilitasi Puskesmas
102	XX	22.08	Rehabilitasi Puskemas Pembantu
102	XX	22.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes
102	XX	23	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
102	XX	23.01	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)
102	XX	23.03	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
102	XX	23.04	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas
102	XX	23.05	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau
102	XX	23.06	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis
102	XX	23.07	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Siak
102	XX	23.08	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura
102	XX	23.09	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan
102	XX	23.10	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang
102	XX	23.11	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang
102	XX	23.12	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun
102	XX	23.13	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam
102	XX	23.14	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib
102	XX	23.15	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit
102	XX	23.16	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya
102	XX	23.17	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh
102	XX	23.18	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako
102	XX	24	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit
102	XX	24.41	Penyusunan DED
102	XX	24.42	Penyusunan UKL-UPL/Amdal
102	XX	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
102	XX	26.01	Penyediaan Alat kesehatan Rumah Sakit
102	XX	26.02	Peningkatan Sarana Rumah Sakit
102	XX	26.03	Peningkatan Prasarana Rumah Sakit
102	XX	26.04	Penyediaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit
102	XX	27	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
102	XX	27.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
102	XX	27.02	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
102	XX	27.03	Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit
102	XX	28	Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
102	XX	28.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
102	XX	30	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
102	XX	30.01	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan
103			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	XX	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
103	XX	15.51	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN DAYUN (DAK)
103	XX	15.52	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KOTO GASIB (DAK)
103	XX	15.56	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KANDIS (DAK)
103	XX	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG
103	XX	17.01	PERENCANAAN TURAP/TALUD/BRONJONG
103	XX	17.12	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG
103	XX	18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
103	XX	18.32	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH I
103	XX	18.33	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH II

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
103	XX	18.34	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH III
103	XX	18.35	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH IV
103	XX	18.36	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH V
103	XX	21	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
103	XX	21.01	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU
103	XX	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
103	XX	23.11	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT
103	XX	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
103	XX	24.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KECAMATAN SABAK AUH
103	XX	24.15	OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN
103	XX	24.16	PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN DAERAH IRIGASI RAWA KECAMATAN SABAK AUH (DAK)
103	XX	28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
103	XX	28.22	NORMALISASI SALURAN/ SUNGAI KABUPATEN SIAK
103	XX	28.23	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE/SALURAN KABUPATEN SIAK
103	XX	42	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
103	XX	42.01	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
103	XX	44	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
103	XX	44.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
103	XX	44.02	PENILAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
103	XX	45	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
103	XX	45.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
103	XX	45.02	PENYUSUNAN DOKUMEN RAKP DAN INVENTARISASI ASET PUSAKA
103	XX	45.03	PENYUSUNAN RTBL KAWASAN PUSAKA PRIORITAS
103	XX	47	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
103	XX	47.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AIR MINUM
103	XX	47.02	PENINGKATAN PELAYANAN AIR MINUM
103	XX	47.03	PAMSIMAS KABUPATEN SIAK
103	XX	47.04	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SPAM DAN JARINGAN KAB. SIAK (DAK)
103	XX	48	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
103	XX	48.01	PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI
103	XX	48.02	PENGADAAN SARANA SANITASI
103	XX	48.03	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA AIR LIMBAH
104			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104	XX	15	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
104	XX	15.01	OPERASIONAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
105			Ketentram dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
105	XX	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
105	XX	15.07	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
105	XX	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
105	XX	16.07	Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol-PP
105	XX	16.08	Peringatan Jambore Satpol-PP
105	XX	16.09	Pengamanan Tempat-tempat Penting
105	XX	16.10	Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting
105	XX	16.11	Operasi Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
105	XX	16.12	Kerjasama Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
106			Sosial
106	XX	15	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
106	XX	15.01	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin
106	XX	15.02	Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kelompok (KUBE-PKH) Keluarga Sangat Miskin
106	XX	15.03	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial
106	XX	15.04	Pembentukan dan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kecamatan
106	XX	15.05	Peringatan Hari Pahlawan Nasional
106	XX	15.06	Rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
106	XX	15.07	Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan PMKS Lainnya
106	XX	22	Program Rehabilitasi Sosial
106	XX	22.01	Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti
106	XX	22.02	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
106	XX	22.03	Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas di Luar Panti
106	XX	22.04	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Panti
106	XX	22.05	Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas
106	XX	22.06	Rujukan Rehabilitasi Sosial ke Panti
106	XX	24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
106	XX	24.01	Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)
106	XX	24.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
106	XX	24.03	Peningkatan Kapasitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
106	XX	24.04	Buffer Stock dan Penyelenggaraan Penyaluran Bansos
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
201			Tenaga Kerja
201	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
201	XX	15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
201	XX	15.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prsarana BLK/ Workshop
201	XX	16	Program Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
201	XX	16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
201	XX	16.03	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
201	XX	17	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
201	XX	17.02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
201	XX	17.03	Pelaksanaan dan Penguatan Fungsi LKS Tripartit Kabupaten Siak
201	XX	17.17	Penyusunan dan Penerapan Sistem Pengupahan Untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak
201	XX	17.19	Pembinaan supervisi hubungan industrial
201	XX	17.22	Monitoring dan Evlauasi
202			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
202	XX	15	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
202	XX	15.01	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
202	XX	15.03	Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak
202	XX	15.04	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
202	XX	15.05	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (PHI)
202	XX	15.06	Sistem Informasi Gender
202	XX	16	Program Perlindungan Anak
202	XX	16.01	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
202	XX	16.05	Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak
202	XX	16.06	Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak
203			Pangan
203	XX	15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
203	XX	15.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
203	XX	15.02	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
203	XX	15.03	Operasional Dewan Ketahanan Pangan
203	XX	15.04	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan
203	XX	15.05	Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
203	XX	15.06	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah
203	XX	16	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN
203	XX	16.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
203	XX	16.02	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (agropolitan)
203	XX	17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
203	XX	17.01	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
204			Pertanahan
204	XX	15	Program pengembangan sistem informasi pertanahan
204	XX	15.11	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak
204	XX	16	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
204	XX	16.07	Sertifikasi Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak
204	XX	16.13	Informasi tanah desa di Kecamatan Tualang
204	XX	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
204	XX	17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
205			Lingkungan Hidup
205	XX	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
205	XX	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
205	XX	15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
205	XX	15.14	Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA kabupaten siak
205	XX	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
205	XX	16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
205	XX	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
205	XX	16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
205	XX	16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
205	XX	16.17	Kegiatan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup
205	XX	16.18	Kegiatan Penilaian AMDAL
205	XX	16.19	Kegiatan Pengawasan AMDAL
205	XX	16.20	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
205	XX	17	Program perlindungan dan konservasi SDA
205	XX	17.13	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
205	XX	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
205	XX	19.07	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
206			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
206	XX	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
206	XX	15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
206	XX	15.15	Pelayanan langsung Kartu Identitas Anak (KIA)
206	XX	15.16	Pelayanan Keliling Pembuatan Akte Kelahiran
206	XX	15.17	Pelayanan Keliling Pembuatan Kartu Keluarga
206	XX	15.18	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
207			Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
207	XX	20	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha ekonomi Kampung
207	XX	20.02	Perlombaan Kampung binaan Program P2WKSS
207	XX	20.03	Perlombaan Kampung dan kelurahan
207	XX	20.07	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
207	XX	20.08	Kampung Binaan Keluarga Sakinah
207	XX	20.12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
207	XX	20.16	Pembinaan Program Pemberdayaan Kampung (PPK)
207	XX	20.17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
207	XX	21	Program Penguatan Pemerintahan Kampung
207	XX	21.14	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
207	XX	21.17	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (Pemilihan Penghulu)
207	XX	21.24	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam Bidang pengelolaan Keuangan Kampung
207	XX	21.28	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kampung
207	XX	21.31	Monitoring Pelaksanaan APBKam dan Pengelolaan Aset Kampung
207	XX	21.32	Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kampung dan Aset Kampung
208			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
208	XX	15	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
208	XX	15.03	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Momen Khusus
208	XX	15.04	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)
208	XX	15.05	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
208	XX	15.06	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan KB/KR dan Pengendalian Kependudukan
208	XX	15.07	Internalisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan di Kabupaten Siak
209			Perhubungan
209	XX	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
209	XX	15.06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
209	XX	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
209	XX	16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
209	XX	16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
209	XX	16.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP
209	XX	17	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
209	XX	17.05	Pemanduan pejabat dan tamu-tamu daerah
209	XX	19	Program Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
209	XX	19.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
209	XX	20	Program peningkatan pelayanan angkutan
209	XX	20.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
209	XX	20.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
209	XX	20.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
209	XX	20.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
209	XX	20.20	Pengoperasian dan pemeliharaan bus sekolah dan angkutan umum

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
209	XX	21	Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
209	XX	21.01	Penyediaan jasa dan pemeliharaan PJU Kabupaten Siak
209	XX	21.02	Pemeliharaan Genset PLTD
210			Komunikasi dan Informatika
210	XX	15	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik
210	XX	15.01	Pengelolaan Informasi Publik
210	XX	15.02	Pelayanan Informasi Publik
210	XX	15.03	Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
210	XX	15.04	peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik
210	XX	15.05	layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan (Pusat API daerah)
210	XX	15.06	Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik PEMDA/Media Internal
210	XX	15.07	Infotorial/mininforial pembangunan daerah melalui media cetak dengan pemerintah daerah
210	XX	15.08	Penyebarluasan melalui media cetak
210	XX	15.09	Penyebarluasan melalui media elektronik
210	XX	15.10	Penyebarluasan melalui media internet/media on line
210	XX	16	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
210	XX	16.01	Penyelenggaraan dan Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik
210	XX	16.02	Penyelenggaraan dan Pengembangan Data Centre (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
210	XX	16.03	Pemeliharaan Infrastruktur Berbagi pakai e-Government
210	XX	17	Program pengembangan e-government dan smart city
210	XX	17.01	Layanan Sistem Informasi Smart City
210	XX	17.02	penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Smart City
210	XX	17.03	Pemeliharaan ekosistem smart city
210	XX	17.04	Penyelenggaraan Infrastruktur Teleconference
211			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
211	XX	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
211	XX	16.01	Promosi komoditi unggulan daerah
211	XX	16.02	Sosialisasi Dukungan Informasi Permodalan
211	XX	16.03	Peningkatan kualitas produk UKM
211	XX	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
211	XX	18.01	Pemeringkatan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (Dalam Rangka Tk. Kabupaten, Propinsi Pusat)
211	XX	18.02	Peningkatan kinerja pelaku / Pengurus koperasi
211	XX	18.03	Pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengurus / pengelolaan koperasi
211	XX	18.04	Pelatihan Audit dan Akuntansi Koperasi
211	XX	18.05	Penguatan Kelembagaan Koperasi Berbasis Syariah
212			Penanaman Modal
212	XX	15	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
212	XX	15.01	Survey Perizinan
212	XX	15.02	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
212	XX	15.03	Penyelenggaraan Pameran Investasi
212	XX	15.04	Monitoring Perizinan
212	XX	16	Optimalisasi Pelayanan Publik
212	XX	16.01	Pengadaan anjungan Informasi mandiri
213			Kepemudaan dan Olah Raga
213	XX	15	Program Peningkatan peran dan serta kepemudaan
213	XX	15.01	Pembinaan organisasi kepemudaan
213	XX	15.02	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibaraka setiap 17 Agustus
213	XX	15.03	Pelatihan marchingband Kab. Siak
213	XX	15.04	Pelatihan orkestra kab. Siak
213	XX	16	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
213	XX	16.01	Pembibitan dan pembinaan olahraga Sepak Takraw
213	XX	16.02	Kejurda Tingkat Pelajar
213	XX	16.03	Open Internasional Siak BMX Tahun 2017
213	XX	16.04	Open Tour Internasional Siak 10 K Tahun 2017
213	XX	16.05	Penyelenggaraan Event Sepatu Roda
213	XX	17	Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga
213	XX	17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
214			Statistik
214	XX	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
214	XX	15.01	Pencetakan data statistik daerah
215			Persandian
215	XX	15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
215	XX	15.01	Layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Daerah
216			Kebudayaan
216	XX	16	Program pengelolaan kekayaan budaya
216	XX	16.01	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air
216	XX	17	Program pengelolaan keragaman budaya
216	XX	17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
216	XX	18	Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan
216	XX	18.01	Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan
217			Perpustakaan
217	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca
217	XX	15.01	Perpustakaan Digital (e Library)
217	XX	15.02	Lomba Minat Baca
217	XX	16	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
217	XX	16.01	Supervisi/pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum;perpustakaan khusus;perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
217	XX	16.02	Lomba Perpustakaan Kabupaten; Kampung; Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus
218			Kearsipan
218	XX	21	Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip
218	XX	21.01	Pembinaan dan Pengelolaan Arsip
218	XX	21.02	Restorasi Arsip/Dokumen Daerah
3			URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN
301			Kelautan dan Perikanan
301	XX	15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
301	XX	15.01	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan
301	XX	15.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
301	XX	16	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
301	XX	16.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK)
301	XX	16.02	Lomba Masak Berbahan Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Makan Ikan
302			Pariwisata
302	XX	15	Program pemasaran pariwisata
302	XX	15.01	Pekan Safar ``Tradisi Ghatib Beghanyut`` Ritual Tolak Bala
302	XX	15.02	Penampilan dan festival seni kabupaten siak
302	XX	15.03	Mengikuti festival dan parade
302	XX	15.04	Penyelenggaraan Event Tour De Siak
302	XX	15.05	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah
302	XX	15.06	Pawai budaya Internasional
302	XX	15.07	Lomba Sampan Internasional
302	XX	15.08	Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori Tahun 2017
302	XX	15.09	Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSH Minas
302	XX	15.10	Festival Gasing Internasional Tahun 2017
302	XX	15.11	Festival Siak Bermadah
302	XX	16	Program Destinasi dan Industri Pariwisata
302	XX	16.01	Pelatihan pelaku ekonomi kreatif
302	XX	16.02	Penataan kawasan objek wisata (DAK)
302	XX	16.03	Pembangunan taman burung (Lanjutan)
302	XX	16.04	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak
302	XX	16.05	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah
303			Pertanian
303	XX	15	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
303	XX	15.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi
303	XX	15.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung
303	XX	15.03	Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan
303	XX	15.04	Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura
303	XX	15.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
303	XX	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
303	XX	16.01	Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
303	XX	17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
303	XX	17.01	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
303	XX	17.02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi
303	XX	17.03	Pembangunan/ Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK APBN)
303	XX	18	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
303	XX	18.01	Revitalisasi Lahan Perkebunan
303	XX	18.02	Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.
303	XX	18.03	Inventarisasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan perkebunan
303	XX	19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
303	XX	19.01	Peningkatan kemampuan lembaga petani
303	XX	19.02	Pekan Nasional (PENAS) KTNA
303	XX	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
303	XX	20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
303	XX	20.02	Penilaian UPTD, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi
303	XX	21	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesmavet
303	XX	21.01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
303	XX	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
303	XX	22.01	Pengembangan agribisnis peternakan
303	XX	22.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
303	XX	22.03	Peningkatan sarana dan prasarana di Demplot Jatibaru
303	XX	22.04	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
303	XX	22.05	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
305			Perdagangan
305	XX	15	Program : Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
305	XX	15.01	Pengawasan UTTP (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)
305	XX	15.02	Pengawasan dan Pelayanan Tera (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)
305	XX	16	Pogram Pengembangan perdagangan dalam daerah
305	XX	16.01	Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kab. Siak
305	XX	16.02	Pengawasan pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat bersubsidi
305	XX	16.03	Pengembangan sarana perdagangan (pasar rakyat)
305	XX	20	Program Pengembangan Kinerja Pasar
305	XX	20.01	Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Pasar
305	XX	20.02	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (pengembangan pasar) (DAK)
305	XX	20.03	Pembangunan Pasar Sungai Apit
306			Perindustrian
306	XX	16	Program Penataan Struktur Industri
306	XX	16.01	Penyusunan DED infrastruktur dasar / fasilitas kawasan industri
307			Transmigrasi
307	XX	15	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi
307	XX	15.01	Perencanaan pengembangan dan pembangunan permukiman transmigrasi
307	XX	16	Program Penyiapan, Pendataan dan informasi ketransmigrasian
307	XX	16.07	Pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
401			Perencanaan
401	XX	18	Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
401	XX	18.05	Koordinasi pengembangan wilayah strategis
401	XX	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
401	XX	21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
401	XX	21.08	Penyusunan rancangan RKPD
401	XX	21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
401	XX	21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
401	XX	21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD)
401	XX	21.15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)
401	XX	21.16	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
401	XX	21.17	Publikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
401	XX	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
401	XX	22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
401	XX	22.08	Monitoring Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dan keuangan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
401	XX	22.09	Kordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten siak
401	XX	22.13	Survey perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan
401	XX	22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
401	XX	23	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
401	XX	23.04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum
401	XX	23.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
401	XX	23.09	Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
401	XX	23.10	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
401	XX	26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
401	XX	26.01	Kordinasi penyusunan aksi PPK kabupaten siak
401	XX	26.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan manusia dan masyarakat
401	XX	26.03	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Deveploment Goals (SDG's) di Kabupaten Siak
401	XX	26.04	Survey perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia dan masyarakat
401	XX	26.05	Monitoring Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat
401	XX	27	Program perencanaan pembangunan bidang sosial
401	XX	27.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial
401	XX	27.02	Survey Perencanaan pembangunan Bidang Sosial
401	XX	27.03	Monitoring perencanaan pembangunan Bidang Sosial
401	XX	27.04	Basis data pembangunan bidang sosial
402			Keuangan
402	XX	15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
402	XX	15.01	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
402	XX	15.02	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah
402	XX	16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
402	XX	16.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
402	XX	16.02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
402	XX	16.03	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
402	XX	16.04	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
402	XX	16.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
402	XX	16.06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
402	XX	16.07	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
402	XX	16.08	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
402	XX	16.09	Peningkatan manajemen investasi
402	XX	16.10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan pajak dan retribusi daerah)
402	XX	16.11	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan pajak dan retribusi daerah)
402	XX	16.12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan OP/SP PBB baru)
402	XX	16.13	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Verifikasi data OP/SP PBB P2)
402	XX	16.14	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pengelolaan data PBB P2 kab. siak)
402	XX	16.15	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan PBB P2 dan BPHTB kab. siak)
402	XX	16.16	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
402	XX	16.17	Penyusunan laporan barang milik daerah
402	XX	16.18	Pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang daerah dan hasil pengadaan
402	XX	16.19	Pengamanan aset pemerintah kab. Siak
402	XX	16.20	Peningkatan manajemen aset/barang daerah (perencanaan kebutuhan)
402	XX	16.21	Sosialisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
402	XX	16.22	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penerimaan daerah)
403			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
403	XX	15	Program Pengembangan Karir Pegawai Aparatur Sipil Negara
403	XX	15.01	Pengelolaan penilaian kompetensi dan potensi Pejabat Struktural
403	XX	15.02	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
403	XX	15.03	Penataan Jabatan Pegawai ASN
403	XX	16	Program Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
403	XX	16.02	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN
403	XX	16.03	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN
403	XX	16.07	Penyelenggaraan SKJ Pegawai
403	XX	17	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
403	XX	17.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN
403	XX	17.03	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian
403	XX	18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Aparatur Sipil Negara
403	XX	18.01	Peningkatan keterampilan dan profesionalime

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
403	XX	18.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai ASN
403	XX	18.07	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
404			Penelitian dan Pengembangan
404	XX	15	Program kerjasama pembangunan
404	XX	15.01	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara
404	XX	15.02	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
404	XX	16	Program pengembangan data/informasi
404	XX	16.01	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah
404	XX	16.02	Upgrade Aplikasi E-planing Kabupaten Siak
405			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
405	XX	18	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana
405	XX	18.02	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana
405	XX	18.03	Pengelolaan manajemen operasional PUSDALOPS
405	XX	20	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
405	XX	20.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
405	XX	20.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
405	XX	20.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
405	XX	20.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
405	XX	20.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
405	XX	20.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
405	XX	20.13	Monitoring/evaluasi dan pelaporan
405	XX	20.15	Peringatan HUT Damkar/rakornas Damkar
405	XX	21	Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
405	XX	21.01	Pelatihan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
405	XX	22	Program pencegahan dini dan mitigasi bencana
405	XX	22.03	Pelatihan penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan
405	XX	22.07	Fasilitasi desa siaga/tanggunh bencana
406			Kesatuan Bangsa dan Politik
406	XX	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
406	XX	15.01	Penyiapan tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
406	XX	15.09	Operasional komunitas intelijen daerah
406	XX	15.11	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
406	XX	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
406	XX	17.10	Pelatihan dasar bela negara
406	XX	17.11	Peringatan Upacara Hari Bela Negara
406	XX	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat
406	XX	21.03	Koordinasi forum -forum diskusi politik
406	XX	21.05	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab.Siak
5			FUNGSI PENDUKUNG
503			Sekretariat Daerah
503	XX	15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
503	XX	15.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
503	XX	15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
503	XX	15.07	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak
503	XX	15.08	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)
503	XX	15.09	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
503	XX	15.10	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
503	XX	15.11	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
503	XX	17	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah
503	XX	17.06	Fasilitasi Pembentukan UPTD/UPTB
503	XX	18	Program peningkatan kualitas kelembagaan
503	XX	18.08	Monitoring dan Evaluasi Peleaksanaan Reformasi Birokrasi
	KOD E		
503	XX	18.09	Fasilitasi penyusunan ANJAB dan ABK
503	XX	18.10	Rakor Kelembagaan
503	XX	18.11	Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
503	XX	18.12	Survey Kepuasan Masyarakat

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
503	XX	21	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
503	XX	21.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
503	XX	21.05	Publikasi peraturan perundang-undangan
503	XX	21.06	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah
503	XX	22	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur
503	XX	22.01	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik
503	XX	23	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD
503	XX	23.03	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah
503	XX	24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
503	XX	24.06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial
503	XX	24.07	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK
503	XX	24.08	Fasilitasi Pengelolaan Sistem LAPORISPA4N
503	XX	24.09	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah (Bed Nama)
503	XX	24.10	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
503	XX	25	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama
503	XX	25.04	Pengiriman Jemaah Calon Haji dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Siak di Embarkasi
503	XX	25.05	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam
503	XX	25.06	Pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh oleh Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	25.07	Safari Jum'at Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	25.08	Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama
503	XX	26.02	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak
503	XX	26.03	Pegiriman Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Siak pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau
503	XX	26.09	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	27	Program Batas Wilayah Pemerintahan
503	XX	27.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota
503	XX	28	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
503	XX	28.15	Penyelesaian Masalah Proses Pengadaan Barang dan Jasa
503	XX	29	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian
503	XX	29.01	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Produksi di Daerah
503	XX	30	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
503	XX	30.01	Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak
503	XX	31	Program kerjasama informasi dengan Mass Media
503	XX	31.08	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid
503	XX	31.09	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya
503	XX	31.10	Ivent - Ivent Kehumasan
503	XX	33	Program Jaminan Sosial
503	XX	33.01	Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
503	XX	37	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
503	XX	37.02	Penyusunan standar satuan harga
503	XX	37.46	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan
503	XX	37.47	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah
503	XX	37.50	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR
504			Sekretariat DPRD
504	XX	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
504	XX	15.01	Pembahasan Rancangan PERDA
504	XX	15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
504	XX	15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
504	XX	15.04	Rapat Rapat Paripurna
504	XX	15.05	Kegiatan Reses
504	XX	15.06	kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
504	XX	15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
504	XX	15.10	Badan legislasi DPRD Kabupaten Siak
504	XX	15.11	Pelaksanaan Tugas-tugas Keprotokoleran DPRD Kabupaten Siak
505			Inspektorat

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
505	XX	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
505	XX	15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKTP)
505	XX	15.02	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung
505	XX	16	Program Peningkatan Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut
505	XX	16.01	Inventarisasi temuan hasil pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah)
505	XX	16.02	Monitoring Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
505	XX	16.03	Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
505	XX	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
505	XX	17.01	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
505	XX	17.02	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan SPIP
505	XX	17.03	Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P)
505	XX	18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
505	XX	18.01	Evaluasi Atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
505	XX	18.02	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
505	XX	18.03	Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Kab. Siak
505	XX	18.04	Review Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang Jasa dan Realisasi Dana Kampung
505	XX	19	Program Penanganan Kasus Pengaduan
505	XX	19.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kab. Siak
505	XX	19.01	Penanganan Kasus Perselisihan Perkawinan ASN
505	XX	20	Program Pencegahan Korupsi
505	XX	20.01	Pembinaan Integritas Aparatur
505	XX	20.02	Optimalisasi Pencegahan Korupsi
505	XX	21	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan dan Prosedur Pengawasan
505	XX	21.01	Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juknis pelaksanaan standar prosedur pengawasan
505	XX	22	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
505	XX	22.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
506			Sekretariat KORPRI
506	XX	17	Program Fasilitas Dewan Pengurus KORPRI
506	XX	17.01	Penyelenggaraan HUT KORPRI
506	XX	17.02	Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional
507			Kecamatan
507	XX	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan
507	XX	31.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
507	XX	31.02	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan (MTQ kecamatan)
507	XX	31.03	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)
507	XX	31.04	Penyelenggaraan Siak Bermadah
507	XX	31.05	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak (MTQ Kabupaten Siak)
507	XX	31.06	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)
507	XX	31.07	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Rag Siswa Nasional (O2SN)
507	XX	31.08	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
507	XX	31.09	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar daerah (POPDA)
507	XX	31.10	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
507	XX	31.11	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan (MTQ Kelurahan)
507	XX	31.12	Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan
507	XX	31.13	Penyelenggaraan Penanaman Perdana Benih Padi (Turun Bumi)
507	XX	31.14	Penyelenggaraan Petang Megang (Ramadhan)

h BUPATI SIAK, P
 77 SYAMSUAR

DAFTAR KODE AKUN APBD
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN
1	2
41	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01	Pajak Hotel
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10	Motel
4.1.1.01.11	Cottage
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata
4.1.1.02	Pajak Restoran
4.1.1.02.01	Restoran
4.1.1.02.02	Rumah Makan
4.1.1.02.03	Kafetaria
4.1.1.02.04	Kantin
4.1.1.02.05	Katering
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.07	Bar
4.1.1.02.08	Jasa Boga
4.1.1.03	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05	Pameran
4.1.1.03.06	Diskotik
4.1.1.03.07	Karaoke
4.1.1.03.08	Klub Malam
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobat/sulap
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar
4.1.1.03.11	Permainan Golf
4.1.1.03.12	Permainan Bowling
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga
4.1.1.04	Pajak Reklame
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron
4.1.1.04.02	Reklame Kain
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06	Reklame Udara
4.1.1.04.07	Reklame Apung
4.1.1.04.08	Reklame Suara
4.1.1.04.09	Reklame Film/slide
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
4.1.1.06	Pajak Parkir

KODE	URAIAN
1	2
4.1.1.06.01	Pajak Parkir
4.1.1.07	Pajak Air Tanah
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah
4.1.1.08	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09	Pajak Lingkungan
4.1.1.09.01	Pajak Lingkungan
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.10.01	Asbes
4.1.1.10.02	Batu Tulis
4.1.1.10.03	Batu Setengah Permata
4.1.1.10.04	Batu Kapur
4.1.1.10.05	Batu Apung
4.1.1.10.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.12.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.11	Retribusi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
4.1.2.01.12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.13	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Di hapus)
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.02.10	Retribusi Penyebrangan di air
4.1.2.02.11	Retribusi Penyebrangan di air
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Di hapus)
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/keramaian
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Peruntukan Tanah
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Pengusahaan Penangkaran Sarung Burung Walet
4.1.2.03.09	Retribusi di Bidang Perdagangan (SIUP/TDG/TDP)
4.1.2.03.10	Retribusi Tenaga Kerja Asing
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

KODE	URAIAN
1	2
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah
4.1.3.01.02	BUMD
4.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4.1.3.02.01	BUMN
4.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan
4.1.4.01.19	Penjualan Hasil Bersih Lelang Aset Daerah
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01	Kerugian Uang
4.1.4.04.02	Kerugian Barang
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10	Bidang Pertanian
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Di hapus)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan (Di hapus)
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.07.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KODE	URAIAN
1	2
4.1.4.07.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum
4.1.4.11.03	Sewa Aset Daerah
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.13.04	Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4.1.4.15	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan
4.1.4.16	Pendapatan BLUD
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD
4.1.4.17	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP)
4.1.4.17.01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
42	Dana Perimbangan
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di hapus)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
4.2.2	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.3	Dana Alokasi Khusus

KODE	URAIAN
1	2
4.2.3.01	Dana alokasi khusus
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus fisik
4.2.3.01.03	Dana alokasi khusus non fisik
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1	Pendapatan Hibah
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01	Pemerintah
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.2	Dana Darurat
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air (Di hapus)
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Di hapus)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian DAU
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan
4.3.4.01.03	Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.05	Dana Desa
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota

KODE	URAIAN
1	2
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
4.3.6.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
4.3.6.01.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
5	BELANJA DAERAH
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Tunjangan Daerah Terpencil
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian
5.1.1.01.23	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru PNSD
5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru PNSD
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.03.02	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Di hapus/kodring tidak dipakai lagi)
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.2	Belanja Bunga
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi
5.1.3	Belanja Subsidi
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga

KODE	URAIAN
1	2
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.4	Belanja Hibah
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5.1.4.01.03	Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum
5.1.4.01.04	Belanja Hibah Kepada Tentara Manunggal Membangun Desa
5.1.4.01.05	Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.4.02.01	Pemerintah Provinsi
5.1.4.02.02	Pemerintah Kabupaten/Kota
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah
5.1.4.03.01	Perusahaan Daerah
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Siak
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sei Apit
5.1.4.04.03	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Minas
5.1.4.04.04	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kandis
5.1.4.04.05	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Tualang
5.1.4.04.06	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Dayun
5.1.4.04.07	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Bunga Raya
5.1.4.04.08	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Koto Gasib
5.1.4.04.09	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sungai Mandau
5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Lubuk Dalam
5.1.4.04.11	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kerinci Kanan
5.1.4.04.12	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sabak Auh
5.1.4.04.13	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Pusako
5.1.4.04.14	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Mempura
5.1.4.04.15	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Siak
5.1.4.04.16	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Apit
5.1.4.04.17	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Minas
5.1.4.04.18	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Dayun
5.1.4.04.19	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kerinci Kanan
5.1.4.04.20	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Bunga Raya
5.1.4.04.21	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Mandau
5.1.4.04.22	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kandis
5.1.4.04.23	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Koto Gasib
5.1.4.04.24	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Lubuk Dalam
5.1.4.04.25	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sabak Auh
5.1.4.04.26	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Mempura
5.1.4.04.27	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Pusako
5.1.4.04.28	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Tualang
5.1.4.04.29	Penghargaan kepada Pokmas - Pokmas yang Berprestasi dalam pelaksanaan Spesific Grant
5.1.4.04.30	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Minas
5.1.4.04.31	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Siak
5.1.4.04.32	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Sungai Apit
5.1.4.04.33	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Tualang
5.1.4.04.34	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Kandis
5.1.4.04.35	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Madrasah Negeri
5.1.4.04.36	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Mempura
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.1.4.05.01	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan
5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan
5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian dan Olahraga
5.1.4.05.04	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
5.1.4.05.05	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi dan Sosial

KODE	URAIAN
1	2
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Terencana
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tidak Terencana
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDI-P
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPP
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKB
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDS
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PBB
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPRN
5.1.7.05.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
5.1.7.05.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh
5.1.7.05.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)
5.1.7.05.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
52	BELANJA LANGSUNG
5.2.1	Belanja Pegawai
5.2.1.01	Honorarium PNS
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak

KODE	URAIAN
1	2
5.2.1.01.06	Honorarium Staf PPTK
5.2.1.02	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
5.2.1.03	Uang Lembur
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)
5.2.2.01.04	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09	Belanja bahan habis pakai material kesehatan
5.2.2.01.10	Belanja bahan habis pakai material laboratorium
5.2.2.01.11	Belanja bahan habis pakai material besi
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai radiologi
5.2.2.01.14	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
5.2.2.01.15	Belanja bahan kelengkapan pertukangan
5.2.2.01.16	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
5.2.2.01.17	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
5.2.2.01.18	Belanja bahan habis pakai radiologi
5.2.2.01.19	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
5.2.2.01.20	Belanja bahan pengharum ruangan
5.2.2.01.21	Belanja bahan pelumas
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06	Belanja tas kegiatan
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08	Belanja Plakat, Souvenir dan Figura
5.2.2.02.09	Belanja dekorasi
5.2.2.02.10	Belanja dokumentasi
5.2.2.02.11	Belanja bahan arsip dokumen
5.2.2.02.12	Belanja kelengkapan olah raga
5.2.2.02.13	Belanja bahan specimen
5.2.2.02.14	Belanja bahan inseminasi buatan
5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak
5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi
5.2.2.02.18	Belanja bahan makan ternak
5.2.2.02.19	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
5.2.2.02.20	Belanja bahan pupuk
5.2.2.02.21	Belanja baju pasien
5.2.2.02.22	Belanja bahan pestisida
5.2.2.02.23	Belanja bahan citra satelit/foto udara
5.2.2.02.24	Belanja Cetak Sawah
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja jasa telepon
5.2.2.03.02	Belanja jasa air
5.2.2.03.03	Belanja jasa listrik
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang
5.2.2.03.05	Belanja berlangganan surat kabar / majalah
5.2.2.03.06	Belanja jasa kawat / faksimili / internet
5.2.2.03.07	Belanja jasa paket / pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja jasa sertifikasi
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.14	Belanja jasa administrasi peserta
5.2.2.03.15	Belanja jasa perawatan kesehatan
5.2.2.03.16	Belanja jasa administrasi pengolahan arsip SKPKD/KPKD
5.2.2.03.17	Belanja jasa analisis di laboratorium
5.2.2.03.18	Belanja jasa dekorasi
5.2.2.03.19	Belanja jasa Administrasi Pimpinan/Ajudan
5.2.2.03.20	Belanja jasa administrasi kantor/Administrasi Pengelola Keuangan/Operator Komputer/Outsourcing /Tenaga Lainnya
5.2.2.03.21	Belanja jasa keamanan kantor
5.2.2.03.22	Belanja jasa kebersihan kantor
5.2.2.03.23	Belanja jasa Petugas lainnya
5.2.2.03.24	Belanja jasa Petugas Pertamanan, Pemakaman, Pasar, Listrik PLTD dan PJU
5.2.2.03.25	Belanja jasa Petugas Pemadam Kebakaran
5.2.2.03.26	Belanja jasa Pengurus Rumah Rehabilitasi
5.2.2.03.27	Belanja jasa pelatih
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tenaga Sistem Informasi/Teknis Informatika/Programmer/Aplikasi Komputer dan Komunikasi
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
5.2.2.03.31	Belanja Jasa penyuluh lapangan
5.2.2.03.32	Belanja Jasa pendampingan keuangan desa
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP)
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan/Operasional Program Kemasyarakatan
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Petugas Speed Boad Patroli, Kapal Ferry, Bus Air dan Tug Boat
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Petugas Siak TV dan Radio Penyiaran Kabupaten (RPK)
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Instruktur Senam
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Petugas Pelaksana UPTD SPAM
5.2.2.03.39	Belanja Jasa Petugas Kebersihan, TPA (BHL), Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat, Venue Olah Raga, Situs Peninggalan Bersejarah dan Objek Wisata
5.2.2.03.40	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Lainnya (SK Bupati Siak)
5.2.2.03.41	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial
5.2.2.03.42	Belanja Jasa Program Pemberdayaan Kampung (PPK)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kematian Non PNS
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service kendaraan bermotor
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01	Belanja cetak
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan
5.2.2.06.03	Belanja penjilidan
5.2.2.06.04	Belanja layout dan typesetting
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05	Belanja sewa tanah
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator
5.2.2.09.02	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
5.2.2.10.08	Belanja sewa mesin peralatan kerja
5.2.2.10.09	Belanja sewa GPS
5.2.2.10.10	Belanja sewa Kompas
5.2.2.10.11	Belanja sewa Mesin Bor
5.2.2.10.12	Belanja sewa planimeter
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.18	Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.18.02	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.18.03	Belanja Jasa Publikasi Media Internet
5.2.2.19	Belanja Jasa Kebersihan
5.2.2.19.01	Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga
5.2.2.20	Belanja Jasa Keamanan
5.2.2.20.01	Belanja Jasa Keamanan
5.2.2.21	Belanja Pajak
5.2.2.21.01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
5.2.2.22	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.22.01	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.22.02	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.22.04	Belanja Pemeliharaan Sungai, Suak, dan Saluran Air
5.2.2.23	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.23.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.23.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.23.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.24	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.24.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.24.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.24.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.24.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.24.05	Belanja Beasiswa Izin Belajar Bagi PNS
5.2.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.25.03	Belanja Kepesertaan
5.2.2.26	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.26.01	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan Jasa
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli
5.2.2.30.01	Honorarium narasumber/tenaga ahli
5.2.2.30.02	Akomodasi narasumber/tenaga ahli
5.2.2.30.03	Transport narasumber/tenaga ahli
5.2.2.31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.31.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.2.31.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)
5.2.2.33	Belanja Beasiswa Pendidikan
5.2.2.33.01	Bantuan Praja IPDN
5.2.2.34	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.34.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.34.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.35	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.35.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.35.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.3	Belanja Modal
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Jalan
5.2.3.01.32	Belanja modal pengadaan tanah kawasan industri
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01	Belanja modal pengadaan traktor
5.2.3.02.02	Belanja modal pengadaan bulldozer
5.2.3.02.03	Belanja modal pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator
5.2.3.02.05	Belanja modal pengadaan dump truk
5.2.3.02.06	Belanja modal pengadaan crane
5.2.3.02.07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.03.14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak
5.2.3.04.02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03	Belanja modal pengadaan becak
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda
5.2.3.04.05	Belanja modal pengadaan karavan
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
5.2.3.05.01	Belanja modal pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02	Belanja modal pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03	Belanja modal pengadaan speed boat
5.2.3.05.04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05	Belanja modal pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06	Belanja modal pengadaan jet foil
5.2.3.05.07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09	Belanja modal pengadaan kapal kargo
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05	Belanja modal pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05	Belanja modal pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang amfibi
5.2.3.07.07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las
5.2.3.08.02	Belanja modal pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan Dinamo
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin packaging
5.2.3.08.08	Belanja modal pengadaan generator
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan
5.2.3.08.10	Belanja modal pengadaan peralatan kelistrikan
5.2.3.08.11	Belanja modal pengadaan peralatan teknis elektronika